

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk Indonesia sekitar kurang lebih 273,52 juta jiwa berdasarkan laporan dari Biro Pusat Statistik (BPS). Jumlah ini tentunya bukan jumlah yang sedikit. Berdasarkan data di atas, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan penduduk terbanyak se Asia Tenggara per 31 Januari 2023. Hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah sebagai tolak ukur untuk melakukan pembangunan dalam negeri. Baik itu di bidang infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Kalau dilihat beberapa tahun belakangan ini pemerintah Indonesia memang sudah sangat baik dalam upaya membangun negeri. Dana yang digunakan oleh pemerintah dalam membangun negeri tentunya bukan angka yang sedikit. Sebagian besar dana yang digunakan oleh pemerintah bersumber dari penerimaan negara yaitu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, dimana salah satu kewajiban perpajakan dari wajib pajak badan yaitu melaporkan pajak penghasilannya. Semakin banyak jenis pajak yang dilaporkan, maka akan semakin banyak aplikasi yang digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak badan. Hal ini tentunya membuat kesulitan bagi wajib pajak karena tidak semua wajib pajak mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang memadai baik di bidang perpajakan atau dalam pengoperasian aplikasi perpajakan. Selain itu, dapat pula menimbulkan besarnya biaya administrasi yang dikeluarkan. Pemerintah tentunya memikirkan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Sistem pelaporan unifikasi adalah solusi yang tepat bagi wajib pajak badan dalam melaporkan beberapa jenis pajaknya. Untuk mewujudkan program pemerintah dalam rangka meningkatkan tata kelola pemotongan dan pelaporan pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU Perpajakan maka penulis tertarik untuk

melaksanakan penelitian terkait Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Unifikasi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengangkat judul “**Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Unifikasi pada Pt X Klien dari Pt Duta Galang Solusi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada penjelasan latar belakang diatas, maka penulis membatasi pembahasan agar lebih dapat fokus pada lingkup pembahasan, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme pemotongan PPh unifikasi pada PT X klien dari PT Duta Galang Solusi?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme pelaporan PPh unifikasi pada PT X klien dari PT Duta Galang Solusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan PPh unifikasi pada PT X klien dari PT Duta Galang Solusi
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan PPh unifikasi pada PT X klien dari PT Duta Galang Solusi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi mahasiswa
 1. Memperbanyak ilmu pengetahuan dibidang pajak tentang mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh unifikasi.
 2. Dapat membantu mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja khususnya di bidang perpajakan.

- b. Bagi Universitas
 - 1. Dapat menjadi referensi baru yang dapat dipergunakan universitas
 - 2. Sebagai bahan evaluasi perkembangan kualitas pendidikan di Universitas terkhusus pada jurusan Program Studi D-III Manajemen Pajak
- c. Bagi PT Duta Galang Solusi
 - Dapat menjadi pertimbangan atau bahan penilaian kualitas kinerja perusahaan sebagai konsultan pajak

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup studi lapangan merupakan pembatasan suatu masalah yang terkait supaya tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas sehingga dapat membantu dalam pemecahan masalah. Maka dari itu, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada “MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH UNIFIKASI PADA PT X KLIEN DARI PT DUTA GALANG SOLUSI”

1.6 Sistematika Penulisan KTIA

Sistematika penulisan ini digunakan agar mempermudah pemahaman terhadap struktur Karya Tulis Ilmiah. Terbagi menjadi lima bab, yaitu

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan KTIA.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup pengertian pajak dan SPT Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi dasar bagi pembahasan yang akan diuraikan pada bab berikutnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup metode yang diterapkan dalam penelitian yang digunakan dalam penulisan KTIA

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan penulis sesuai seperti rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup tentang kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan penulis.

